



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



SELASA KLIWON

13 FEBRUARI 2024 (2 RUWAH 1957 / TAHUN LXXIX NO 134)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

Surat Suara Sah dalam Pemilu 2024

Mencoblos dengan alat yang disediakan pada kolom calon yang dipilih

SURAT SUARA SAH

Surat Suara Tidak Sah

Jenis surat suara Pemilu 2024

- Presiden dan Wakil Presiden
- Anggota DPD
- Anggota DPR RI
- Anggota DPRD Provinsi
- Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- Anggota DPRD Kota

Imbauan untuk masyarakat

- Datang lebih awal ke tempat pemungutan suara TPS, waktu pemungutan dimulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB waktu setempat.
- Pastikan surat suara yang akan dicoblos tidak rusak dan terdapat tanda tangan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)
- Tidak membawa telepon genggam/alat perekam ke dalam bilik suara.

Keterangan: Di DKI Jakarta hanya 4 surat suara, tanpa anggota DPRD Kabupaten/Kota. Di Luar negeri hanya 2 surat suara, yakni presiden-wakil presiden dan DPR-RI

Sumber: Antara

KPU Imbau Para Pemilih Buka Surat Suara Sebelum Masuk Bilik

JAKARTA (KR) - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim As'ari meminta pemilih yang datang mencoblos ke tempat pemungutan suara pada Rabu (14/2) agar membuka surat suara lebih dulu sebelum masuk bilik suara.

"Mestinya sebelum masuk, surat suara dibuka dulu di situ, boleh. Untuk melihat surat suaranya kondisi bagus atau tidak," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2).

Hal itu untuk mengantisipasi apabila para pemilih

ganti," ujarnya.

Tidak hanya itu, bagi pemilih yang merasa salah mencoblos juga dapat kesempatan untuk menukar surat suaranya. Kendati demikian, hal itu menyesuaikan kondisi di tempat pemungutan suara (TPS).

Oleh karena itu, Hasyim meminta masyarakat untuk memeriksa lebih dulu surat suara yang mereka terima sebelum masuk ke bilik. "Kalau (kuantitas) surat suaranya tidak cukup, ya tidak bisa (minta ganti surat suara baru)," jelas Hasyim.

Ia menambahkan, KPU menyiapkan surat suara cadangan di setiap TPS yang jumlahnya 2 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT). "Surat suara cadangan ada 2 persen dari jumlah DPT. Katakanlah DPT-nya 300, jadi cadangannya cuman enam lembar," tambahnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum

BEBERAPA NAMA DAPAT UNDANGAN MEMILIH 29.541 Orang Meninggal Dunia Masih Masuk DPT

YOGYA (KR) - Komisi A DPRD DIY menemukan 29.541 nama orang yang sudah meninggal dunia berpotensi masih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah tersebut adalah yang mendapatkan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) lima kabupaten/kota se-DIY selama periode Juni 2023 hingga Januari 2024.

Jumlah terbanyak ada di Kabupaten Sleman dengan 9.993 akta kematian, 6.777 akta di Kabupaten Bantul, 6.016 akta di Kabupaten Gunungkidul, 3.811 akta di Kabupaten

Kulonprogo dan 2.944 akta dari Kota Yogyakarta. "Data tersebut adalah akta kematian yang terbit selama periode Juni 2023 hingga Januari 2024. Belum tentu meninggalnya pada bulan tersebut. Ada potensi nama-nama tersebut masih tercatat dalam DPT," kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto dalam jumpa pers, Senin (12/2).

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan nama-nama yang sudah meninggal tersebut juga mendapatkan surat undangan memilih dan juga telah didistribusikan kepada pemilih. Dicontohkan, ada pemilih yang sudah meninggal dan masih tercatat di TPS 01 dan TPS 03 Kotabaru Kota Yogyakarta.

"Dalam rapat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu beberapa waktu lalu, kami telah menyampaikan temuan tersebut. Kami meminta agar KPU bisa melakukan pemutakhiran data pemilih. Bisa dengan menerbitkan DPT Hasil Perbaikan (DPT HP). Namun, KPU tidak mengindahkan masukan kami tersebut," tandas Eko.

Analisis Polemik Bansos

Prof Agus Widarjono PhD

BANSOS menjadi polemik di tengah masa kampanye pemilu. Polemik pertama dimulai ketika seorang menteri yang merupakan ketua partai pengusung salah satu paslon meminta para penerima bansos berterima kasih kepada Presiden. Kedua, pernyataan yang sama juga muncul dari salah satu Menko yang juga tim sukses saat kampanye.

Polemik Bansos kembali meruncing sebelum hari pencoblosan. Polemik dipicu oleh kebijakan pemerintah mengelompokkan tambahan bansos baru sebagai pengganti bantuan langsung tunai El Nino yang belum direncanakan sebelumnya. Bansos ini diberikan selama Februari-April yang dibayarkan mulai Februari dengan skema rapel dengan total anggaran Rp 11,25 triliun

Ada tiga fungsi pokok anggaran negara dalam APBN yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Bansos dan bantuan perlindungan sosial lainnya merupakan perwujudan fungsi distribusi dari anggaran pemerintah, siapapun presidennya. Perlindungan sosial juga dilakukan presiden sebelum Presiden Jokowi.

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:56	15:08	18:07	19:18	04:24

Selasa, 13 Februari 2024

KORUPSI PENGADAAN LNG DI PERTAMINA Karen Didakwa Rugikan Negara Rp 1,77 T

JAKARTA (KR) - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustianawati didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp 1,77 triliun. Kerugian tersebut akibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014.

Dakwaannya tersebut diontopkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember

Tidak Terbit:

SEHUBUNGAN Hari Libur Nasional untuk pelaksanaan Pemilu 2024, maka SKH *Kedaulatan Rakyat* tidak terbit pada hari Rabu (14 Februari 2024). *KR* akan mengunjungi pembaca kembali, Kamis (15 Februari 2024). Pembaca, pemasang iklan, dan relasi harap maklum. (Penerbit)-d

PERTEMUAN JOKOWI-MEGAWATI Sultan Benarkan Diminta Menjembatani

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X membenarkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta dirinya untuk menjembatani (memfasilitasi) pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Seperti yang sempat diungkapkan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie.

"Betul (sempat diminta Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati), tapi *kan* saya menunggu presiden. Jadi nanti terserah kepada presiden, begitu saja. Kalau memang presiden memerlukan, saya bersedia (menjembatani), *kan* hanya itu. Kalau tidak *ya* tidak apa-apa. Sudah begitu saja," kata Sri Sultan HB X saat dimintai komentarnya di Kompleks Kepatihan, Senin (12/2).

Sultan mengatakan, soal rencana pertemuan dengan Ketua PDI Perjuangan sepenuhnya merupakan inisiatif Presiden Jokowi, sementara dirinya hanya diminta sebagai fasilitator. Jadi, dirinya bersifat pasif. Oleh karena itu, sewaktu-waktu Presiden Jokowi meminta, pihaknya siap bergerak.

"Ya berarti bukan saya yang mengambil inisiatif, yang mengambil inisiatif Bapak



Sri Sultan HB X

Presiden sendiri. Ya terserah Bapak Presiden, kalau mau ketemu Mbak Mega ya saya fasilitasi. Kalau bisa ketemu sendiri *kan* ya syukur. Terserah Bapak Presiden sendiri, kalau saya sifatnya pasif bukan *ngoyak-oyak*," terang Sultan. (Ria)-d

DITEMUKAN UANG DAN 113,8 GRAM GANJA Oknum PPK Wonogiri Terlibat Narkoba

WONOGIRI (KR) - Oknum Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wonogiri Kabupaten Wonogiri, HBR (49) ditangkap Satnarkoba Polres Wonogiri. Awalnya, penangkapan warga Kelurahan Giripurwo Kecamatan Kota Wonogiri ini lantaran terlibat jual beli ganja kering sebanyak 113,8 gram lebih. Namun belakangan terlibat politik uang dengan salah satu paslon capres-cawapres 2024.

"Setelah mobil tersangka ini kita geledah, ternyata di dalamnya (mobil) ditemukan sejumlah kaos bergambar salah satu pasangan capres-cawapres dan uang Rp 136 juta lebih," ungkap Kapolres Wonogiri AKBP Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah SH SIK MM MSI saat menggelar konferensi pers di Mapolres Wonogiri, Senin (12/2).

Terkait dugaan sasu politik uang yang dilakukan oknum Ketua PPK Wonogiri, Kapolres Indra minta agar wartawan menghubungi Ketua Bawaslu. "Soalnya ini (dugaan politik uang) merupakan pelanggaran UU Pemilu, maka kasus HBR sudah kami serahkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti, bukan menjadi kewenangan kepolisian," katanya didampingi Wakapolres, para Kabag dan Kasat di lingkungan Polres Wonogiri.

Menurut Kapolres, ada dua kasus menonjol yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas melalui media massa agar kasus-kasus tersebut tidak terulang di daerahnya. Selain terungkapnya kasus peredaran narkoba jenis ganja yang diakui terbesar di Wonogiri selama ini, yang dilakukan tersangka HBR juga tabrak lari hingga korban tewas di TKP ruas Jalan Ngadirojo-Sidoarjo Wonogiri

'GEJAYAN MEMANGGIL' KEMBALI Keprihatinan Terhadap Kondisi Demokrasi

SLEMAN (KR) - Mahasiswa dari beberapa kampus di Yogyakarta, Senin (12/2) menggelar seruan lewat Aksi 'Gejayan Memanggil'. Unjukrasa yang berlangsung sejak pagi di kawasan Gejayan Depok Sleman ini, hingga menjelang sore menuju titik kumpul di Bundaran UGM. Mereka memilih titik lokasi di Gejayan, karena di tempat itu terdapat sejarah pergerakan mahasiswa Yogyakarta.

Salah satu peserta aksi demo Nugroho Prasetyo Aditama mengatakan, kegiatan bersama teman-teman mahasiswa lainnya itu, merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi demokrasi saat ini.

"Kami melihat, negara sedang tidak baik-baik saja. Seorang penguasa menggunakan berbagai cara un-

tuk mempertahankan kekuasaannya. Demokrasi penguasa ini yang kemudian perlu kita ingatkan. Kami ingin aksi ini berjalan damai dan baik," tutur Nugroho.

Nugroho menuturkan,

momentum dugaan para guru besar sebelumnya juga menjadi sebuah keprihatinan bangsa. "Karena guru besar sangat legitimate. Kami juga mendukung apa disampaikan mereka,"



Aksi demo para mahasiswa dalam 'Gejayan Memanggil'.

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● LAMA tinggal di Medan, baru saya sadari kalau saya bersahabat dengan tiga pemilik warung lontong sarapan pagi. Uniknya, mereka sama-sama punya masalah dengan pasangannya tetapi kasusnya berbeda, Si A mengaku diselingskuhi, pasangan Si B pergi meninggalkannya, dan pasangan Si C kurang tanggung jawab. (Siti Alfiana, Jalan Cendrawasih 3/307 Medan)-d